

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang saat ini sebagai negara yang sedang berkembang, terus melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan (Nazara, 2010). Kemajuan suatu negara dapat diukur melalui berbagai indikator, termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat, indeks pembangunan manusia, stabilitas politik, tingkat pendidikan, infrastruktur, dan inovasi (Djanggo et al., 2020). Faktor-faktor ini berkontribusi pada penilaian kemajuan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kesenjangan ekonomi dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti akses terhadap sumber daya, infrastruktur yang tidak merata, tingkat pendidikan yang berbeda, dan kebijakan ekonomi yang tidak merata dalam distribusi kekayaan dan peluang (Aulia et al., 2024).

Karakteristik pertumbuhan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan PDRB per kapita, PDRB per kapita yang tinggi akan mengubah pola konsumsi dalam memenuhi kebutuhan (Todaro 1998). Ini berarti bahwa semakin tinggi daya beli masyarakat, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Ini akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di mana salah satu indikatornya adalah paritas daya beli. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan kecuali jika didahului atau disertai dengan peningkatan pembangunan manusia.

Menurut Adam Smith bahwa manusia merupakan salah satu factor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan spesialisasi dalam meningkatkan produktivitas (Evensky, 2015). Pembangunan manusia merupakan indikator utama dalam mengukur pembangunan suatu negara. Oleh karena itu



UNDP (*United Nations Development Programme*) membentuk indikator bernama *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak pengukuran IPM diberlakukan, orientasi pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kepada manusia sebagai elemen dasar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Badrudin, 2011).

Dalam teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti perkembangan teknologi yang bersifat eksogen, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika internal dalam sistem ekonomi. Faktor-faktor seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor endogen dalam pertumbuhan ekonomi yang dimana melalui pendidikan dan kesehatan serta proses inovasi menjadi elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan tersebut (Romer, 1990).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang di jalankan pemerintah. Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Pada persamaan identitas pendapatan nasional menggambarkan kesetaraan antara total output yang dihasilkan dalam perekonomian dengan total pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi. Dalam persamaan tersebut, variabel Y menunjukkan pendapatan nasional yang sekaligus merefleksikan sisi penawaran agregat, sedangkan komponen di sisi kanan persamaan mencerminkan permintaan agregat yang terdiri dari konsumsi rumah tangga (C),

(I), pengeluaran pemerintah (G), serta selisih antara ekspor dan impor
 Pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong

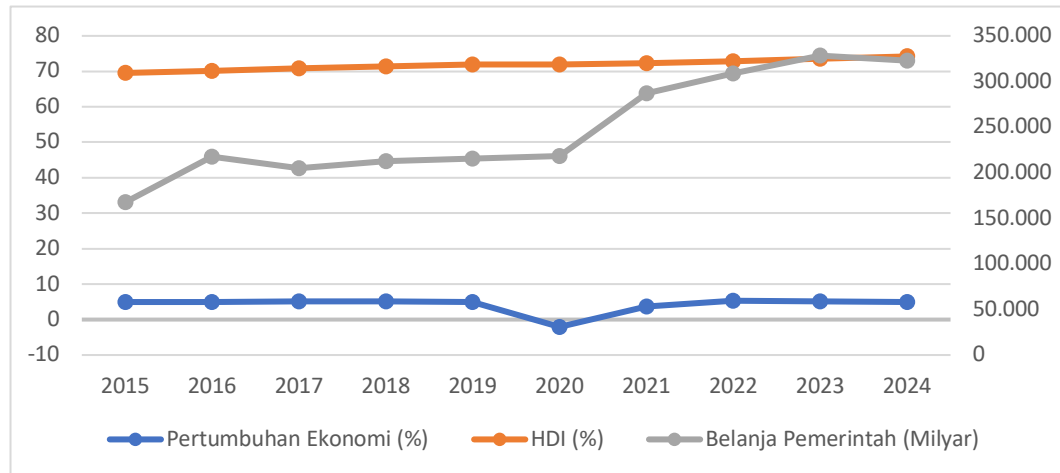


aktivitas ekonomi. Dengan membandingkan besaran pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional serta menganalisis perubahannya dari waktu ke waktu, dapat diidentifikasi tingkat kontribusi sektor pemerintah dalam proses pembentukan pendapatan nasional (Angraini et al., 2023).

Menurut teori Keynes, pengeluaran pemerintahlah yang mengatur tingkat perkembangan ekonomi yang dimana pengeluaran pemerintah memberikan efek *crowding in*, pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan stimulus dalam aktivitas ekonomi, yang dimana semakin banyak pemerintah membelanjakan uangnya maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dimana merupakan hasil dari kebijakan fiskal yang ekspansif. Pengeluaran pemerintah yang ditujukan pada fungsi tertentu dapat menciptakan *multiplier effect* ekonomi melalui agregat permintaan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu dibutuhkan kontribusi pemerintah, salah satunya melalui alokasi pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja menurut fungsi yang tepat. Peningkatan pengeluaran pemerintah meningkatkan total permintaan yang selanjutnya akan meningkatkan produksi yang akhirnya akan meningkatkan PDB (Romer, 1986a).

Hubungan antara pengeluaran pemerintah, SDM dan pertumbuhan ekonomi telah menarik perhatian luas selama bertahun-tahun karena para ekonom berjuang untuk menentukan dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.





Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

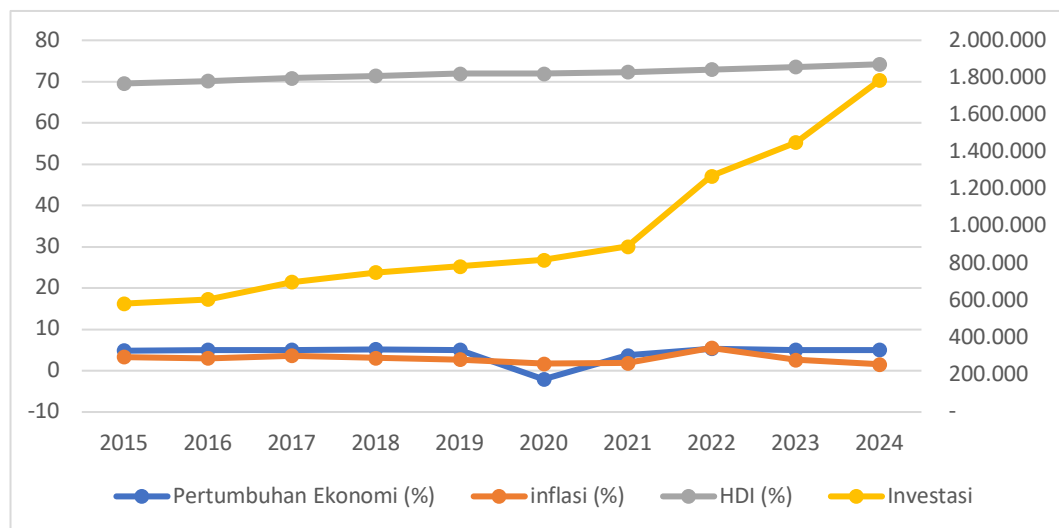
Gambar 1.1 Perkembangan Pertumbuhan ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Government Expenditure (Education & Health) di Indonesia Tahun 2015-2024.

Berdasarkan Gambar 1.1 dari pengeluaran pemerintah (P/K) yang meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp 215 triliun yang sebelumnya hanya sebesar 212 triliun terdapat tren grafik yang tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun menjadi 5,02 persen pada tahun 2019, fenomena yang sama juga terjadi pada tahun 2023 yang dimana pengeluaran pemerintah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 328 triliun tetapi terjadi penurunan dengan pertumbuhan ekonomi yang dimana hanya sebesar 5,05 persen, jika dilihat bersamaan dengan grafik pada *human development index (HDI)* atau indeks pembangunan manusia yang di mana grafiknya cenderung terjadi kenaikan setiap tahun walaupun terjadi pandemi COVID 19 yang membuat hal ini tidak sejalan dengan teori yang ada diharapkan bahwa ketika pengeluaran pemerintah meningkat seharusnya memiliki dampak positif terhadap indeks pembangunan manusia dan output juga meningkat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,



ri data yang di tampilkan menunjukkan hal yang berbeda sehingga fakta tidak sejalan.

Selain pengeluaran pemerintah beberapa variabel ekonomi yang dapat mempengaruhi perekonomian adalah investasi dan inflasi, dimana pengaruhnya sangat luas terhadap perekonomian negara dan bisa berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat secara umum, karena itu investasi dan inflasi sangat dijaga perkembangannya. Berikut merupakan grafik fluktuasi investasi, inflasi, HDI dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 10 tahun terakhir dari tahun 2015 hingga 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1.2 Perkembangan Investasi, Inflasi, kualitas sumber daya manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2015-2024.

Gambar 1.2 dapat di lihat dari grafik investasi pada data periode 2015–2024 menunjukkan bahwa investasi nasional meningkat drastis, dari Rp 583.314 miliar pada 2015 menjadi Rp 1.783.963 miliar pada 2024. Namun, laju pertumbuhan ekonomi selama periode yang sama cenderung stabil dalam kisaran 4,8%–5,3%, dengan pengecualian signifikan pada tahun 2020 yang dimana pada



tahun ekonomi mengalami kontraksi sebesar -2,07% akibat pandemi 2020 namun pada investasi terjadi kenaikan yang cukup tinggi sebesar Rp 1.200.000 miliar. Pada tahun 2022 sampai tahun 2024 jika dilihat dari grafik untuk

investasi terjadi kenaikan yang secara terus menerus secara signifikan yaitu dari Rp 1.270.181 miliar menjadi 1.783.963 miliar hal ini berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi penurunan dari 5.31 persen menjadi 5.03 persen. Kesenjangan antara tingkat pertumbuhan investasi yang sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang relatif datar mengindikasikan bahwa tidak seluruh peningkatan investasi langsung termanifestasi dalam pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Berdasarkan data yang ada grafik menunjukkan bahwa data tidak sejalan dengan teori yang ada dimana jika investasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

Investasi (penanaman modal) dalam sektor pendidikan dan kesehatan sehingga berdampak kepada peningkatan HDI dan pertumbuhan ekonomi (Asnawi & Fitria, 2018). investasi merupakan salah satu komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam model pertumbuhan Solow (1956), akumulasi modal fisik melalui investasi memainkan peran penting dalam meningkatkan output jangka pendek dan menstimulasi pertumbuhan jangka panjang. Secara lebih lanjut, teori pertumbuhan endogen menyempurnakan pandangan ini dengan menekankan bahwa investasi, terutama yang diarahkan pada modal manusia, inovasi, dan teknologi, dapat menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa menghadapi *diminishing returns* (Rashid, 2023).

Variabel ekonomi lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu inflasi, inflasi yang berarti kemerosotan nilai uang karena banyaknya jumlah uang beredar sehingga ketika inflasi naik maka harga konsumen akan naik serta barang-barang naik. Dari gambar 1.3 tren inflasi setiap tahunnya berubah atau

atif selama periode tahun 2015 hingga tahun 2024, inflasi pada tahun 19 terjadi penurunan sebesar 3,13 persen menjadi 2,72 persen tetapi



tidak di ikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi tetapi yang terjadi sebaliknya dimana pertumbuhan ekonomi turun sebesar 5,02 persen, tren penurunan yang sama juga terjadi pada tahun 2023 yang dimana inflasi turun sebesar 2,61 persen di ikuti dengan penurunan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena yang ada tidak sejalan dengan teori yang ada, dimana jika inflasi menurun di harapkan output/pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Pada grafik antara inflasi dan HDI pada tahun 2017 terjadi kenaikan pada inflasi yang dimana pada tahun sebelumnya sebesar 3,02 persen menjadi 3,61 persen dan pada HDI terjadi kenaikan dari 70,18 persen menjadi 7,81 persen, fenomena yang sama terjadi pada tahun 2020 ke 2022 yang di mana inflasi terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,68 persen menjadi 5,51 persen hal ini tidak sesuai dengan teori yang memiliki pengaruh negatif.

Inflasi yang tinggi akan berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat, karena laju kenaikan harga barang dan jasa melebihi pertumbuhan pendapatan. Ketimpangan ini menyebabkan terbatasnya kemampuan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan investasi. Akibatnya, terjadi penurunan dalam kegiatan investasi produktif, yang pada gilirannya dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Sujatmiko et al., 2025)

Hal ini membuat pemerintah sulit menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, sehingga kualitas SDM cenderung rendah. Misalnya, di beberapa negara di Afrika atau Asia Selatan, perbaikan kualitas SDM sangat menantang karena ketidakstabilan harga dan distribusi pendapatan yang tidak



Inflasi yang stabil merupakan salah satu syarat demi terciptanya
lahan ekonomi yang berkesinambungan (S. Sari & Anggadha Ratno, 2020).

Selain itu, perbedaan hasil penelitian seperti (Nyasha & Odhiambo, 2019) berpendapat bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak linear dan bahwa ada titik optimal di mana pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan di atasnya berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian lain seperti Macek (2014) dalam penelitiannya dengan menggunakan analisis regresi panel terhadap efek *crowding out* pada struktur total pengeluaran pemerintah dimana pengeluaran yang tidak produktif menurunkan rasio pertumbuhan PDB. Analisis ini menemukan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif. Selain itu, Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menjadi penghambat pertumbuhan dengan menekan pengeluaran sektor swasta, terutama jika pengeluaran tersebut didanai melalui pinjaman (Stratmann dan Okolski, 2010).

Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks negara berkembang, di mana pembangunan manusia berperan sebagai jembatan strategis antara kebijakan publik dan hasil pembangunan ekonomi jangka panjang. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan manusia, pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter termasuk di dalamnya alokasi anggaran pengeluaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kualitas SDM agar menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Akanyonge, 2022) di negara Ghana yang merupakan negara berkembang dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa total dari pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan

n memiliki dampak positif secara langsung terhadap pertumbuhan

Namun hasil penelitian berbeda terjadi di Nigeria, studi menemukan



bahwa pengeluaran pemerintah berulang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara belanja modal memiliki efek positif yang tidak signifikan (Onifade et al., 2020).

Sumber daya manusia berperan sebagai indikator yang merepresentasikan kualitas hidup masyarakat melalui tiga pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Kualitas sumber daya manusia tidak semata-mata diposisikan sebagai (*outcome*) akhir dari proses pembangunan, melainkan juga dapat berfungsi sebagai mediasi yang menjembatani pengaruh kebijakan publik dan intervensi struktural terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks tersebut, kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpotensi menjadi penghubung antara kebijakan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Investasi terhadap kualitas sumber daya manusia pada dasarnya tidak serta-merta menambah output ekonomi, tetapi terlebih dahulu meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu belum memasukkan kualitas sumber daya manusia sebagai variabel mediasi dalam model hubungan tersebut. Padahal, bagi Indonesia, peningkatan kualitas manusia merupakan agenda prioritas pembangunan yang berperan penting dalam mengubah kebijakan fiskal dan kondisi makroekonomi menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.

Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia menjadi variabel mediasi menjelaskan antara input pembangunan seperti pengeluaran sektor sosial ormasi menjadi output ekonomi. Penelitian ini memberikan kontribusi



konseptual dan empiris dalam kajian ekonomi pembangunan dengan mengkaji antara belanja pemerintah, investasi, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kualitas sumber daya manusia sebagai variabel mediasi. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya menelusuri pengaruh langsung dari instrumen fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi, studi ini menekankan pada mekanisme transmisi tidak langsung, khususnya melalui dimensi kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, temuan dalam studi ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pasar dan kebijakan makro, tetapi juga secara signifikan ditentukan oleh kapasitas dan kualitas manusia yang dibentuk melalui investasi di sektor pendidikan dan kesehatan—dua elemen utama yang tercermin dalam komponen kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi agar nantinya kebijakan yang ada dapat memberikan dampak positif, oleh karena itu penelitian ini berjudul **Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas SDM?
2. Apakah pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas SDM?



3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas SDM ?
4. Apakah investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas SDM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah pengeluaran pemerintah dalam bidang Pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas SDM.
2. Untuk menganalisis apakah pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas SDM.
3. Untuk menganalisis apakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas SDM.
4. Untuk menganalisis apakah investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas SDM.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan kebijakan yang tepat terhadap pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.



Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi mengenai pengaruh variabel makroekonomi terhadap

pertumbuhan ekonomi , yaitu pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan dan pendidikan, investasi, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia di Indonesia.

3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta dampak dari pengeluaran pemerintah, inflasi dan investasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya dalam jangka panjang (Kuznets, 1963). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada peningkatan produksi masyarakat dan merupakan salah satu ukuran penting keberhasilan pembangunan. Dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing negara, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga output dapat ditingkatkan (Surya et al., 2021). Seiring dengan perkembangan ilmu ekonomi, berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan determinan serta mekanisme dibalik proses pertumbuhan tersebut. Secara umum, teori pertumbuhan ekonomi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga paradigma besar, yaitu teori pertumbuhan klasik, neoklasik.

Teori pertumbuhan klasik yang di pelopori oleh adam Smith, david ricardo dan thomas maltus menekankan pentingnya akumulasi modal pembagian kerja serta peran mekanisme pasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyatakan bahwa dengan melakukan spesialisasi dalam meningkatkan

itas, manusia dapat menjadi faktor dalam pertumbuhan ekonomi.

nudian keterbatasan dari teori klasik pendekatan neoklasik yang di
kan oleh Robert Solow dalam salah satu modelnya yang paling



berpengaruh dalam menginterpretasikan pertumbuhan ekonomi, yang menyajikan sebuah fungsi produksi di mana input tenaga kerja dan modal bergerak menuju kondisi yang stabil (Boianovsky & Hoover, 2014).

Modal manusia mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu atau kelompok untuk memproduksi barang dan jasa. Pada dasarnya, individu dengan pendidikan dan pengalaman yang lebih banyak terbukti lebih produktif sehingga produksi barang yang dihasilkan akibat faktor tersebut akan berkembang, sumber daya manusia berperan sebagai modal fisik yang menjadi penggerak utama dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka Panjang (Ahmad Ma'ruf, 2008), oleh karenanya mereka berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan. Karena pentingnya modal manusia ini, pemerintah dan akademisi berfokus pada implikasi kebijakan investasi modal manusia (Haini, 2020). Untuk menunjang pengembangan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia ataupun tenaga kerja maka perlu dilakukan program dan pelatihan guna memenuhi hal tersebut (Y. Sari et al.,2024). Pandangan ini yang menegaskan bahwa kualitas modal manusia serta inovasi teknologi memegang peran penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Paddu et al., 2025). Pandangan ini menempatkan pengeluaran pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai instrumen strategis dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Keynes

Teori pertumbuhan Keynes mengatakan peran pemerintah dalam mempengaruhi permintaan agregat dengan demikian dapat mempengaruhi makro agar mendekati posisi full employment. Keynes dalam teorinya menekankan perekonomian agar tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme



pasar. Hingga batas tertentu, peran pemerintah justru diperlukan. Misalnya jika terjadi pengangguran pemerintah bisa mempebesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Dengan demikian, sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Teori pertumbuhan NeoKlasik yang merupakan penyempurnaan dari teori sebelumnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi disertai dengan peranan pemerintah.

(Lucas, 1988) menekankan bahwa modal manusia memainkan peran sentral dalam proses pertumbuhan. Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan, maka hal tersebut merupakan investasi dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kualitas hidup masyarakat. Akumulasi modal manusia ini menjadi dasar dari peningkatan produktivitas, kreativitas, dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut (Romer, 1986a), pengetahuan dan inovasi bersifat non-rival dan memiliki efek limpahan (*spillover effect*), sehingga investasi dalam pendidikan dan teknologi tidak hanya menguntungkan pelaku individu, tetapi juga meningkatkan produktivitas secara agregat. Dalam kerangka ini, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan sosial, tetapi juga menjadi faktor penggerak pertumbuhan jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks pembangunan manusia, indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi ukuran penting untuk menilai capaian pembangunan yang berbasis pada tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. IPM secara langsung mencerminkan hasil dari



pengeluaran pemerintah pada sektor sosial. Dengan demikian, pendekatan pertumbuhan endogen memberikan dasar teoritis bahwa peningkatan kualitas SDM melalui pengeluaran negara di sektor-sektor tersebut akan berdampak positif terhadap dinamika ekonomi jangka panjang.

Indeks Pembangunan Manusia atau dikenal dengan *Human Development Index (HDI)* merupakan salah satu alternatif untuk mengukur pembangunan selain menggunakan Produk Domestik Bruto. Nilai IPM suatu negara atau daerah menunjukkan seberapa jauh negara atau daerah tersebut telah mencapai target yang ditentukan, yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar untuk semua lapisan masyarakat (tanpa terkecuali), serta tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia (Ghislandi et al., 2019).

Ada berbagai variabel yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yaitu, pengeluaran pemerintah, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, belanja modal, jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, pendidikan, teknologi dan lain sebagainya. Salah satu variabel yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia adalah pengeluaran pemerintah (Lumi et al., 2022).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara. Dalam literatur ekonomi publik, pengeluaran

ah dipahami sebagai alokasi dana yang dilakukan oleh sektor publik untuk



membayai berbagai kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi (COULOMBE, 2024).

Menurut Keynes bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran yang $Y = C + I + G + X - M$. Rumus ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y mewakili pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel di sisi kanan disebut permintaan agregat. Variabel G mewakili pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y dan mengamati dari waktu ke waktu maka dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Yusuf et al., 2021).

Keynes memandang pengeluaran pemerintah sebagai tangga menuju pertumbuhan ekonomi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang (Corsetti et al., 2012). Menurut teori Keynesian, pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia yang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori Keynesian mendalilkan bahwa semakin banyak pengeluaran suatu negara, maka pertumbuhan ekonominya akan semakin tinggi sebagai hasil dari kebijakan fiskal yang ekspansif (Riza dan Wiryana, 2021). Asumsinya adalah ketika pengeluaran pemerintah meningkat, produksi akan mengikuti, menstimulasi permintaan agregat dan dengan demikian meningkatkan PDB (Nemushungwa, 2023).

Pengeluaran pemerintah terhadap kebijakan investasi modal manusia, dan belanja publik untuk kesehatan dan pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kesehatan adalah komponen dari modal manusia, dan



karenanya harus dipertimbangkan dan dimasukkan ketika merumuskan model pertumbuhan endogen (Barro, 1991; Mankiw, Romer, & Weil, 1992). Penduduk yang lebih sehat dapat bekerja lebih lama dan lebih produktif. Selain itu, penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif mereka untuk meningkatkan efisiensi ekonomi (Schultz, 1999). Demikian pula, Barro (1997) juga menemukan hubungan positif antara pendidikan dan harapan hidup yang lebih tinggi, sehingga memberikan insentif untuk mengakumulasi lebih lanjut modal manusia (R.A, 2020). Pengeluaran pemerintah dalam pendidikan merupakan investasi pemerintah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan disimpulkan bahwa pengeluaran investasi oleh pemerintah harus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Nyasha & Odhiambo, 2019)

Hubungan yang saling melengkapi antara kesehatan dan pendidikan ini memberikan insentif untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, investasi kesehatan dan pendidikan akan menghasilkan efek umpan balik yang positif, di mana peningkatan pertumbuhan dan pendapatan per kapita akan meningkatkan konsumsi makanan yang kaya akan nutrisi. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan masalah kausalitas antara kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Investasi di bidang kesehatan dapat meningkat dengan meningkatnya pendapatan. Ketika sebuah negara menjadi lebih kaya, mungkin rasional bagi individu untuk meningkatkan pengeluaran perawatan kesehatan, menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran perawatan kesehatan (Marcheline et al., 2023).

Dengan demikian, pengeluaran pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai investasi jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam struktur ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing. Oleh karena



itu, arah kebijakan pengeluaran pemerintah sebaiknya ditujukan pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda besar terhadap peningkatan kapasitas produktif masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan inovasi. Perumusan dan implementasi kebijakan pengeluaran pemerintah yang efektif membutuhkan pertimbangan terhadap efisiensi, pemerataan, serta dampaknya terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan.

Investasi merupakan salah satu komponen fundamental dalam mendorong proses pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Dalam konteks ekonomi makro, investasi mencerminkan akumulasi modal yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan infrastruktur, dan mengembangkan sektor-sektor produktif. Investasi yang efektif akan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*), baik terhadap permintaan agregat maupun terhadap penciptaan lapangan kerja. Melalui mekanisme ini, investasi berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi tidak hanya memengaruhi sisi permintaan agregat dalam jangka pendek, tetapi juga membentuk kapasitas produksi nasional dalam jangka panjang.

Secara teoritis, investasi dibedakan menjadi dua jenis utama: investasi swasta dan investasi publik. Investasi swasta dipengaruhi oleh faktor seperti tingkat suku bunga, ekspektasi keuntungan, dan stabilitas makroekonomi. Sementara itu, investasi publik, terutama oleh pemerintah, memainkan peran strategis dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang tidak disediakan secara optimal oleh sektor swasta, seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan

n (Barro, 1990).



Menurut teori akumulasi modal yang dikembangkan oleh Harrod-Domar, investasi menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi karena menghasilkan peningkatan stok modal yang dibutuhkan untuk memperluas kapasitas produksi. Dalam model ini, tingkat pertumbuhan ekonomi bergantung pada rasio tabungan dan efisiensi penggunaan modal. Walaupun model ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan dinamika teknologi dan tenaga kerja, namun tetap relevan dalam menggambarkan peran strategis investasi sebagai pengungkit pertumbuhan (Domar, 1946).

Di sisi lain, efektivitas investasi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan dan kebijakan negara. Dalam konteks negara berkembang, keberhasilan investasi sangat bergantung pada kestabilan politik, efektivitas tata kelola birokrasi, serta kepastian regulasi hukum (Rodrik et al., 2004). Oleh sebab itu, untuk menciptakan iklim investasi yang produktif, diperlukan reformasi struktural dan sistem tata kelola yang akuntabel. Investasi berkorelasi erat dengan dimensi pembangunan manusia. Ketika investasi difokuskan pada sektor-sektor strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, maka akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jenis investasi ini tidak hanya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperbaiki distribusi kesejahteraan dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, investasi tidak boleh dipandang hanya sebagai instrumen ekonomi semata, melainkan juga sebagai alat strategis untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berbasis

dan kesejahteraan.



Variabel lain yang dapat mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus atau suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum (Hasibuan et al., 2020). “Menurut Sukirno (2000) dalam suatu negara, inflasi sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian negara tersebut karena : a. Tingkat inflasi yang tinggi mempengaruhi tingkat produksi dalam negeri, melemahkan produksi barang ekspor. Tingkat inflasi yang tinggi menurunkan produksi karena harga menjadi tinggi dan permintaan akan barang menurun sehingga produksi menurun. b. Inflasi menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang dan kenaikan harga upah buruh, maka kalkulasi harga pokok meninggikan harga jual produk lokal. Di lain pihak turunnya daya beli masyarakat terutama berpenghasilan tetap akan mengakibatkan tidak semua bahan habis terjual. Inflasi menyebabkan naiknya harga jual produksi barang ekspor dan berpengaruh terhadap neraca pembayaran (Indriyani, 2016).”

Menurut Teori Monetarisme, inflasi dalam jangka panjang disebabkan oleh peningkatan jumlah uang yang beredar, yang pada akhirnya tidak memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. “Milton Friedman menekankan bahwa inflasi merupakan fenomena moneter yang pada akhirnya dapat merusak stabilitas ekonomi. Ketika inflasi meningkat, khususnya dalam jangka panjang, ketidakpastian ekonomi bertambah dan menciptakan distorsi di pasar.

Ketidakpastian ini mengganggu fungsi harga sebagai sinyal pasar, sehingga keputusan konsumsi, produksi, dan investasi menjadi kurang efisien. Investor, , akan cenderung menahan investasi jangka panjang karena sulit diraikan tingkat keuntungan riil yang akan diperoleh.



Peningkatan Inflasi yang konsisten berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan manusia. Ini menghambat perencanaan jangka panjang, mengurangi tabungan dan akumulasi modal, mengekang investasi, mempengaruhi pendapatan agregat, dan mempromosikan penggunaan sumber daya yang tidak efisien, yang menyebabkan ketidakpastian dan gangguan berkelanjutan pada indikator sosial ekonomi lainnya. Ini mengurangi daya beli beberapa bagian masyarakat. Akibatnya, Inflasi yang lebih tinggi berdampak buruk pada pembangunan manusia yang berkelanjutan dengan membatasi pilihan orang. Tingkat Inflasi yang lebih rendah mendorong aktivitas ekonomi, tetapi lebih dari tingkat ambang batas, itu memiliki konsekuensi yang merugikan bagi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Inflasi tidak hanya berdampak langsung pada laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memengaruhi berbagai determinan pertumbuhan lainnya, seperti akumulasi modal manusia dan aktivitas penelitian serta pengembangan (R&D). Melalui mekanisme efisiensi, tingkat inflasi yang lebih tinggi dapat menurunkan produktivitas total faktor sehingga pada akhirnya memperlemah kinerja makroekonomi jangka panjang dalam perekonomian berbasis pasar (Padu et al., 2024).

Kenaikan inflasi pada tingkat yang relatif tinggi berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian sehingga dapat menunda keputusan investasi dan menurunkan tingkat pengeluaran. Selain itu, inflasi yang meningkat mengurangi nilai riil uang, yang pada gilirannya melemahkan daya beli masyarakat dan berdampak pada



an kesejahteraan hidup. Tingkat kesejahteraan tersebut sering kali diukur kualitas sumber daya manusia. Todaro (2006) menyatakan bahwa

pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan terhadap pencapaian kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Peningkatan daya beli masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa berkaitan erat dengan salah satu komponen kualitas SDM, yaitu indikator pendapatan (Hasibuan et al., 2020).

Inflasi menggerus daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Ketika inflasi tinggi, akses terhadap layanan dasar menurun, yang berdampak negatif terhadap dimensi kualitas SDM. Inflasi berdampak lebih besar pada masyarakat miskin, sehingga memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini menyebabkan disparitas dalam akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, yang menurunkan kualitas pembangunan manusia (Todaro & Smith, 2020).

Secara teoritis, inflasi adalah variabel makroekonomi yang berperan ganda. Dalam tingkat moderat, inflasi bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun bila tidak terkendali, inflasi akan melemahkan daya beli, mengganggu stabilitas ekonomi, dan menurunkan kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu, stabilitas harga merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM.

Pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu inflasi di bawah sepuluh persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena



ampu memberi semangat kepada pengusaha, untuk lebih meningkatkan
nya. Pengusaha semangat memperluas produksinya karena dengan

kenaikkan harga yang terjadi para pengusaha mendapat lebih banyak keuntungan. Selain itu, peningkatan produksi memberikan dampak positif lain yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen (Indriyani, 2016).

2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan ekonomi

Teori pertumbuhan keynes menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi di perlukan adanya peranan pemerintah untuk melakukan pembentukan Modal manusia terutama terdiri dari pendidikan dan kesehatan, kedua komponen ini merupakan pilar penting dalam pengembangan sumber daya manusia (Olayiwola, 2021).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu elemen utama dalam kebijakan ekonomi, yang dimanfaatkan sebagai instrumen operasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ahuja & Pandit, n.d.). Pendidikan merupakan sumber penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi di suatu negara. Pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan merupakan investasi dalam jangka panjang untuk sumber daya manusia yang nantinya akan membuat suatu daerah menjadi produktif, hal ini dikarenakan pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, produktivitas tenaga kerja dan kualitas hidup yang nantinya dapat mendorong



ihan ekonomi. Selain itu pengeluaran pemerintah dianggap sebagai terhadap sumber daya manusia yang berhubungan positif dengan an derajat kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Oleh

karena itu pengeluaran dalam sektor pendidikan dan kesehatan akan menghasilkan *multiplier effect* ke dalam perekonomian yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia.

Tulisan ini mengacu pada teori Keynes (1936) yang berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka teorinya, pengeluaran pemerintah dipandang sebagai variabel eksogen yang bersifat independen dan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme efek pengganda. Oleh karena itu, peningkatan dalam pengeluaran pemerintah diyakini dapat memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi (R.A, 2020). Penelitian empiris yang sejalan dengan pandangan ini antara lain (Monteiro & Turnovsky, 2008a), yang menyatakan pengeluaran pemerintah yang produktif untuk infrastruktur dan pendidikan memiliki kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daripada pengeluaran konsumsi.

2.3 Hubungan Inflasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Inflasi dapat diukur secara luas, seperti kenaikan harga total atau kenaikan biaya hidup suatu negara. Jika inflasi tidak terkendali akan berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat karena secara riil pendapatannya juga menurun. Pada saat pendapatan riil menurun ini akan berdampak terhadap indeks pembangunan manusia karena masyarakat tidak



peroleh standar hidup layak seperti memenuhi kebutuhan pokok dan terhadap kesehatan dan pendidikan. Hal ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena produktivitas tenaga kerja menurun. Oleh sebab itu inflasi

yang stabil menjadi faktor yang cukup penting dalam mendorong indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Berbagai studi telah menemukan bukti adanya efek ambang batas, di mana inflasi di bawah tingkat tertentu berdampak minimal terhadap pertumbuhan, tetapi di atas ambang batas tersebut, dampaknya menjadi negatif secara signifikan (Kusumatriana et al., 2022), (Thanh et al., 2024).

2.4 Hubungan Investasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi.

Investasi, baik yang bersifat domestik maupun asing, merupakan faktor kunci dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan memperluas basis ekonomi. Namun, dampak investasi tidak hanya terbatas pada peningkatan output, melainkan juga memiliki pengaruh tidak langsung melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (Todaro & Smith, 2015).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, peran sumber daya manusia menjadi penting sebagai variabel antara yang menghubungkan investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, misalnya, akan meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperpanjang usia harapan hidup, meningkatkan tingkat pendidikan, dan secara umum memperkuat kapasitas produktif tenaga kerja (UNDP, 2019). Kualitas sumber daya manusia yang lebih baik pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Barro, 1991).



hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi bersifat tidak langsung dan dimediasi oleh SDM. Dengan kata lain, investasi yang diarahkan ke sektor sosial akan memperbaiki dimensi-dimensi utama kualitas sumber

daya manusia, yang kemudian menjadi dasar bagi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, efektivitas investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana investasi tersebut mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdulkarim, 2023) investasi dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang stabil akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk kembali berinvestasi dalam pembangunan manusia. Artinya, hubungan ini bersifat timbal balik dan memperkuat satu sama lain. Negara-negara yang berhasil mempertahankan tingkat investasi tinggi pada sektor pendidikan dan kesehatan umumnya menunjukkan kinerja pembangunan ekonomi yang lebih baik dibandingkan negara yang hanya berfokus pada investasi fisik (Barro & Lee, 2013).

2.5 Tinjauan Empiris

Dalam bagian ini terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh akademisi maupun praktisi. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan kajian pustaka:

(Ahuja & Pandit, n.d.) meneliti tentang *Public Expenditure and Economic Growth : Evidence from the Developing Countries*. Dalam penelitiannya ini menunjukkan bahwa hubungan antara PDB dan pengeluaran pemerintah bersifat searah dimana kausalitas dari pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional. Yang dimana variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.



(JUSE et al., 2007) meneliti tentang *Public Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis for Developing Countries*. Dalam penelitiannya

ini menunjukkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan secara agregat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.

(Hussain et al., 2018) dalam penelitiannya yang berjudul *The Interrelationship between Money Supply, Inflation, Public Expenditure and Economic Growth*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan jangka panjang antara inflasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun berbeda dengan hubungan antara jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan dan untuk pengaruh dalam jangka pendek dengan menggunakan Vector Error Mechanism (VECM) variabel pengeluaran pemerintah, inflasi dan jumlah uang beredar signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

(Mulugeta Emeru, 2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Effect of Public Expenditure on Economic Growth in the Case of Ethiopia*. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pengeluaran dalam sektor pertanian, Pendidikan, kesehatan dan investasi, namun di sisilain dalam analisis kointegrasi mengindikasikan bahwa pendorong terbesar dan dalam pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

(Akanyonge, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul *Government Expenditure on Economic Growth Evidence From Ghana*. Berdasarkan hasil

penelitian, konsumsi akhir pemerintah sebagai bagian dari Produk Domestik Bruto menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.



Pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan tersebut melalui mekanisme pengendalian inflasi, peningkatan pembentukan modal bruto, serta konsistensi dalam keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan penduduk.

(Saungweme & Odhiambo, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Inflation and Economic Growth in Kenya: An Empirical Examination*, menunjukkan bahwa inflasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kenya dalam jangka panjang. Hasil kausalitas menunjukkan bahwa adanya hubungan kasualitas searah dalam jangka pendek yang berbeda dari pertumbuhan ekonomi ke inflasi di Kenya.

(ramayani, 2015) dalam penelitiannya yang berjudul *The Effect of Investment, Unemployment, Inflation, Human development and Government Expenditure on Economic Growth and Poverty in Indonesia*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk persamaan pertama investasi, pengangguran dan inflasi secara simultan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

(Pangaribuan et al., 2024) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Tingkat Suku bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitiannya suku bunga memiliki pengaruh tingkat investasi, konsumsi dan inflasi. Suku bunga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

(Cenc, 2022) yang dimna dalam penelitiannya yang berjudul *Government Expenditure and Economic Growth in Euro Area Countries*. Hasil penelitiannya

ran pemerintah memiliki efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara kawasn EURO. Sehingga dapat di asumsikan bahwa campur



tangan pemerintah dalam perekonomian memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

(Raghutla & Chittedi, 2021) yang dimana hasil penelitiannya dalam jangka panjang menunjukkan bahwa sektor riil dan pengembangan keuangan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa pasokan uang, nilai tukar, dan inflasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, masing-masing. Mengingat temuan ini, kami menyarankan agar pemerintah dan pembuat kebijakan negara-negara BRICS menginisiasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan pengeluaran sektor riil dan mengembangkan sektor keuangan. Peningkatan sektor riil akan memungkinkan perekonomian untuk tumbuh lebih lanjut dengan memastikan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh negara anggota BRICS.

(Emako et al., 2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa investasi langsung asing (FDI) yang spesifik sektor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. FDI di sektor manufaktur memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan, sementara FDI di sektor tersier memiliki dampak negatif.

